

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia meningkatnya proses modernisasi yang berkembang semakin pesat menghasilkan sistem ekonomi lain yaitu sektor informal, di mana terjadi akibat meningkatnya pengangguran yang sangat tinggi dan adanya ketimpangan sosial yang cukup besar. Sektor informal keberadaanya sangat penting apalagi di jaman krisis ekonomi seperti sekarang ini, di mana jumlah permintaan angkatan kerja informal semakin banyak seiring siklus usaha sektor formal yang tidak berjalan dengan normal dan membutuhkan keahlian atau pendidikan khusus. Sektor informal berpeluang menampung tenaga kerja yang di PHK, sehingga menjadi harapan dan tumpuan di jaman sekarang bahkan di masa yang akan datang (Mulyadi, 2003).

Sektor formal yang di anggap terlalau selektif dalam menampung tenaga kerja, justru berdampak positif bagi sektor informal, karena sektor informal menjadi lebih berpeluang dalam penyerapan tenaga kerja yang belum bekerja atau masyarakat yang tidak mempunyai keahlian khusus dan pendidikan khusus. Adanya kejadian ini semestinya pemerintah menjadikan hal tersebut sebagai tantangan tersendiri dalam membalikan arah pembangunan ekonomi dari yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi menuju pemerataan ekonomi, yang tujuannya adalah untuk mensejahterakan ekonomi negara (Mulyadi, 2003).

Kegiatan sektor informal yang terlihat nyata adalah terjadi dikawasan yang penduduknya sangat padat, dimana dikawasan tersebut persaingan ekonomi

semakin ketat yang mengakibatkan banyaknya pengangguran. Hal ini menjadi masalah yang utama di kota-kota besar, ditambah lagi makin deras arus urbanisasi penduduk dari desa ke kota, kota dianggap sebagai penyedia lapangan pekerjaan, walaupun pada kenyataannya sering meleset dari yang diperkirakan dan dari yang diharapkan. Dampaknya para migran tersebut tidak dapat masuk ke sektor formal dan akhirnya masuk ke sektor informal. Oleh karena itu sektor informal dianggap sebagai 'Katup Penyelamat' dalam mengatasi masalah ekonomi kaitanya penyerapan ketenagakerjaan (Mulyadi, 2003).

Ever dan Korff (2002) mengemukakan sektor informal sebagai bidang produksi yang barang dan jasanya tidak terdaftar secara resmi atau diluar kontrol pemerintah, dimana sektor informal merupakan sebuah kegiatan usaha ekonomi yang ditangani dan dimodali sendiri, serta tenaga kerjanya berasal dari anggota keluarga sendiri, sehingga tidak ada kontrak ketenagakerjaan. Usaha sektor informal tersebut salah satunya adalah Pedagang Kaki Lima di sepanjang jalan raya, yang menjadi contoh nyata munculnya kegiatan sektor informal.

Pedagang Kaki Lima di Purwokerto dalam lima tahu terakhir jumlahnya mengalami penambahan, Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (DINPERINDAGKOP) Kabupaten Banyumas mengatakan jumlah populasi Pedagang Kaki Lima ditahun 2013 ada sekitar 1300 pedagang yang sebelumnya ditahun 2008 ada sekitar 1100 pedagang, ini dikarenakan persaingan usaha sektor formal di Purwokerto semakin ketat dan membutuhkan pendidikan yang tinggi untuk dapat berpartisipasi di usaha sektor formal, mengingat di Purwokerto sendiri banyak sekali masyarakat yang berpendidikan tinggi, tetapi lapangan

pekerjaan masih sempit. Selain faktor tersebut juga ada faktor yang mempengaruhi meningkatnya Pedagang Kaki Lima di Purwokerto, dimana Pemerintah Daerah mengaku tidak pernah memungut iuran sewa lokasi jualan kepada para Pedagang Kaki Lima (Faedlulloh, 2011).

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2011, tentang lokasi, waktu, ukuran, bentuk sarana dan tata cara permohonan surat penempatan kegiatan pedagang kaki lima di Purwokerto. Tempat-tempat yang boleh digunakan untuk berjualan antara lain ruas jalan Jendral Soedirman, ruas jalan Pemuda, ruas Ahmad Yani, ruas jalan Jendral Sutoyo, ruas jalan Pahlawan, ruas jalan Perintis Kemerdekaan, ruas jalan Riyanto, ruas jalan Dr. Suparno, ruas jalan Wihara, ruas jalan Martadireja I, ruas jalan Martadireja II, dan ruas jalan Adiyaksa. Sebenarnya lokasi yang pedagangnya sudah mempunyai surat ijin oleh Pemerintah Daerah sendiri adalah di jalan Perintis Kemerdekaan dan jalan Suharso, namun di Jalan Perintis Kemerdekaan masih ada juga Pedagang yang tidak mempunyai Surat Ijin berdagang, adapun jenis dagangannya seperti makanan ringan, buah-buahan, rokok, bensin, koran, asesoris, jasa tambal ban, jasa menjahit, jasa servis arloji, jasa sol sepatu dan lain-lain.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka peneliti melakukan penelitian dengan judul ***“Kajian Kondisi Sosial Ekonomi Pedagang Kaki Lima di Jalan Perintis Kemerdekaan Kecamatan Purwokerto Selatan”***.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah Kondisi Sosial Ekonomi Pedagang Kaki Lima di Jalan Perintis Kemerdekaan Kecamatan Purwokerto Selatan”.

C. Tujuan Penelitian

Dari perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi sosial ekonomi Pedagang Kaki Lima di Jalan Perintis Kemerdekaan Kecamatan Purwokerto Selatan .

D. Manfaat Penelitian

1. Diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi kehidupan sosial ekonomi Pedagang Kaki Lima di Jalan Perintis Kemerdekaan Kecamatan Purwokerto Selatan, sehingga pemimpin lembaga atau institusi dapat mengambil langkah-langkah dalam hal penanganan masalah yang ditimbulkan oleh Pedagang Kaki Lima.
2. Diharapkan juga hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan penelitian lain yang berhubungan dengan penelitian ini.
3. Hasil penelitian diharapkan menjadi bahan pengembangan dan pengkajian konsep-konsep tentang berbagai aspek dalam upaya pemberdayaan ketenagakerjaan agar mampu berjalan secara optimal.
4. Bagi Pemerintah Daerah bermanfaat dalam upaya memberdayakan Pedagang Kaki Lima, sehingga dapat meringankan ekonomi daerah.